

## Pendampingan Dokumen Hukum Koperasi Karyawan Sebagai Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas di SMK PPN Sembawa

Nurliana Santy<sup>1</sup>, Namira Imelia Ramadiena Noer<sup>2</sup>,  
Rahma Dwi Lestari<sup>3</sup>, Ridho Destriansyah<sup>4</sup>, Endah Dewi Purnamasari<sup>5</sup>, Yeni<sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Indonesia  
Email: [2022520009@students.uigm.ac.id](mailto:2022520009@students.uigm.ac.id)<sup>1</sup>, [2022520011@students.uigm.ac.id](mailto:2022520011@students.uigm.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2022520012@students.uigm.ac.id](mailto:2022520012@students.uigm.ac.id)<sup>3</sup>, [2022510128@students.uigm.ac.id](mailto:2022510128@students.uigm.ac.id)<sup>4</sup>,  
[endahdps@uigm.ac.id](mailto:endahdps@uigm.ac.id)<sup>5</sup>, [yeni@uigm.ac.id](mailto:yeni@uigm.ac.id)<sup>6</sup>

### Abstrak

Koperasi karyawan merupakan wadah ekonomi yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, namun kerap menghadapi persoalan transparansi, akuntabilitas, serta tingginya risiko kredit macet. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di Desa Sembawa Mulia, dilakukan pendampingan penyusunan dan perbaikan dokumen hukum Koperasi Karyawan SMK PP Sembawa sebagai upaya penguatan tata kelola kelembagaan. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara dengan pengurus dan anggota, analisis dokumen, serta lokakarya bersama untuk menyusun revisi dokumen hukum sesuai dengan prinsip koperasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dokumen hukum koperasi, seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), aturan pinjaman, dan perjanjian kredit, masih lemah dalam aspek pengaturan hak dan kewajiban anggota, prosedur pinjaman, serta mekanisme pengawasan. Melalui pendampingan ini, disusun dokumen hukum baru yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel, serta memuat ketentuan sanksi yang tegas terhadap keterlambatan pembayaran. Perbaikan dokumen hukum terbukti meningkatkan pemahaman anggota terhadap aturan koperasi, memperkuat transparansi laporan keuangan, dan membantu menekan potensi kredit macet. Dengan demikian, kegiatan KKNT ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan tata kelola koperasi menuju lembaga yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas, Dokumen Hukum, Koperasi Karyawan, Kredit Macet, Transparansi.*

### *Assistance in the Preparation of Cooperative Legal Documents for Transparency, Accountability, and Mitigation of Bad Debts*

### Abstract

*Employee cooperatives play a vital role in improving the welfare of their members, yet often face challenges related to transparency, accountability, and the risk of non-performing loans. Through a Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata or KKN) in Sembawa Mulia Village, assistance was provided in drafting and improving the legal documents of the Employee Cooperative at SMK PP Sembawa as an effort to strengthen institutional governance. The methods employed included observation, interviews with cooperative managers and members, document analysis, and participatory workshops to revise the cooperative's legal documents in accordance with cooperative*

*principles and prevailing regulations. The results revealed that the cooperative's legal documents, such as the Articles of Association/Bylaws (AD/ART), loan regulations, and credit agreements, were still weak in regulating members' rights and obligations, loan procedures, and supervisory mechanisms. Through this program, revised legal documents were produced with clearer, more transparent, and accountable provisions, including firm sanctions for late payments. These improvements enhanced members' understanding of cooperative rules, strengthened financial transparency, and helped mitigate the risk of non-performing loans. Therefore, this KKN activity provides tangible contributions to improving cooperative governance towards a healthier, transparent, and sustainable institution.*

**Keywords:** Accountability, Legal Documents, Employee Cooperatives, Bad Debts, Transparency.

## PENDAHULUAN

Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (UU No. 25/1992). Di Indonesia, organisasi koperasi mempunyai ciri-ciri yaitu perkumpulan orang, adanya kerja sama dan gotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban. Koperasi di Indonesia dibentuk berdasarkan kesadaran para anggotanya. Selain itu, koperasi di Indonesia bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama dari para anggotanya. Koperasi di Indonesia bukan merupakan kumpulan modal. Hak tertinggi dalam pengambilan keputusan didasarkan dari hasil rapat seluruh anggota. Koperasi di Indonesia dilaksanakan tanpa ada keterlibatan pihak lain selain anggota serta diselenggarakan tanpa ada paksaan, ancaman, dan intimidasi dari pihak luar. Pembagian pendapatan di dalam koperasi di Indonesia berdasarkan kepada besarnya sumbangsih dari masing-masing anggota dalam bentuk karya dan jasa.

Koperasi memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bentuk organisasi lainnya. Salah satunya adalah prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela, yang berarti siapa pun dapat menjadi anggota koperasi asalkan memenuhi syarat dan bersedia berkontribusi secara aktif (Perkasa et al., 2024) Koperasi karyawan merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui layanan simpan pinjam dan usaha lainnya. Namun, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya modal atau jumlah anggota, melainkan juga oleh tata kelola hukum dan administratif yang baik. Koperasi di SMK PP memberikan tiga jenis layanan utama, yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi penjualan barang berupa alat sekolah, serta koperasi penyewaan alat pertanian.

Koperasi Simpan Pinjam menjadi kendala utama dalam berjalannya operasional koperasi. Hal itu disebabkan adanya kredit macet dan pencatatan keuangan yang kurang jelas dari pengurus sebelumnya, kurangnya dokumen hukum seperti surat perjanjian akad, SOP peminjaman, dan mekanisme sanksi. Serta surat perjanjian pinjaman dan kurang adanya transparansi bagi sesama anggota. Dalam era digital, koperasi dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dan bertransformasi agar dapat bertahan dalam lingkungan yang senantiasa dinamis (Mutia, et.al., 2024). Untuk memulai proses transformasi ini, langkah awal yang krusial adalah membangun karakter kreatif dan inovatif bagi insan yang menjadi penggerak koperasi (Nasution et al., 2024).

Ketiadaan atau kelemahan dalam dokumen hukum koperasi menyebabkan lemahnya posisi koperasi secara legal apabila terjadi sengketa, serta menyulitkan dalam menegakkan

disiplin pembayaran. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi aspek yang belum optimal, karena anggota seringkali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum atas pinjaman. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terhadap dokumen hukum koperasi seperti anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), surat akad pinjaman, serta sistem pelaporan keuangan sangat penting dilakukan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem koperasi yang lebih profesional, bertanggung jawab, dan mampu menurunkan angka kredit macet. Melalui Program KKNT mahasiswa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kelayakan dokumen hukum dan mengurangi resiko kredit macet serta menciptakan transparansi dalam mengelola keuangan koperasi.

## METODE

Pendampingan penyusunan dokumen hukum koperasi dilakukan secara luring atau tatap muka langsung. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di SMK PP Negeri Sembawa Mulia Desa Persiapan Sembawa Mulia Kecamatan Banyuasin. Kegiatan berlangsung pada tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan 7 Agustus 2025. Kegiatan melibatkan Bendahara dan Pengurus Koperasi SMK PP. Kegiatan ini juga melibatkan para mahasiswa yang membantu dalam proses pelaksanaan pendampingan penyusunan dokumen hukum koperasi. Adapun tahapan dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

- a) Tim KKNT melakukan persiapan baik persiapan perizinan sampai dengan mengumpulkan data awal mengenai kondisi koperasi dan melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan pengurus koperasi untuk mengidentifikasi kelemahan terkait transparansi laporan, akuntabilitas pencatatan, dan prosedur pemberian kredit.
- b) Setelah persiapan dirasa sudah matang, dilaksanakan pendampingan dengan memberikan arahan dan contoh praktik pemberian dokumen koperasi seperti (buku kas anggota, arus kas, neraca sederhana, dokumen kredit) dan membantu menyusun prosedur sederhana mitigasi kredit macet seperti perjanjian tertulis, pencatatan jatuh tempo, serta laporan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan mudah dipahami oleh anggota.
- c) Selanjutnya tahapan akhir yaitu melakukan evaluasi hasil kegiatan, memberikan masukan terkait keberlanjutan sistem dokumentasi koperasi yang sistematis, transparan dan akuntabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan wawancara dengan pengurus koperasi SMK PP Negeri Sembawa Desa Sembawa Mulia menunjukkan bahwa sebelum dilakukan pendampingan, Koperasi Karyawan SMK PP Sembawa belum memiliki dokumen hukum yang lengkap dan terstruktur, seperti Surat perjanjian, pernyataan akad, surat konsekuensi serta buku keanggotaan untuk setoran wajib dan setoran pokok. Mahasiswa KKNT kelompok 6 memberikan edukasi dan contoh surat tersebut sesuai dengan PSAK yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan komitmen pengurus koperasi terhadap pentingnya legalitas badan usaha dalam mendukung pengelolaan koperasi yang profesional dan berkelanjutan (Listianti, 2024).

Pendampingan dilakukan melalui diskusi, praktik langsung, dan pembenahan dokumen koperasi. Tim pengabdian membantu pengurus dalam menyusun format pencatatan keuangan baru, meliputi:

- Buku kas harian dengan kolom penerimaan dan pengeluaran yang terpisah.
- Daftar pinjaman dan cicilan anggota yang lebih sistematis.
- Laporan arus kas bulanan sebagai dasar transparansi kepada anggota.

Selain itu, pengurus juga diberikan contoh format sederhana perjanjian pinjaman yang berisi jumlah pinjaman, jangka waktu, serta kewajiban pengembalian. Format ini diimplementasikan sebagai bagian dari strategi mitigasi kredit macet.

Aktivitas utama koperasi simpan pinjam ini adalah mengumpulkan simpanan dari anggota koperasi berupa tabungan dan deposito serta memberikan pinjaman kepada anggota koperasi yang lain (Safitri et al., 2024). Setelah diberikan pendampingan, koperasi mulai merencanakan untuk membuat dokumen hukum yang lebih tertata, seperti surat perjanjian pinjaman, pernyataan akad, serta aturan mengenai konsekuensi keterlambatan pembayaran. Hal ini membantu meningkatkan kejelasan hak dan kewajiban antara pihak koperasi dan anggota, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet. Berikut dokumen yang biasanya diperlukan agar pengajuan pinjaman memenuhi prinsip SAK:

- Dokumen Identitas dan Keanggotaan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya, Kartu Anggota Koperasi atau bukti keanggotaan, dan Bukti setoran simpanan pokok dan wajib (menunjukkan anggota aktif).
- Dokumen Pengajuan Pinjaman, seperti formulir pengajuan pinjaman yang memuat: Data anggota, Jumlah pinjaman yang diajukan. Tujuan pinjaman, Jangka waktu dan skema angsuran (Surat pernyataan kesanggupan membayar angsuran dan Surat persetujuan pemotongan gaji (jika berlaku di koperasi karyawan)).
- Dokumen Keuangan, seperti Slip gaji atau surat keterangan penghasilan (untuk analisis kemampuan bayar) dan Rekening koran/bukti simpanan anggota (jika dibutuhkan untuk membatasi plafon pinjaman).
- Dokumen Pendukung Jaminan/Penjamin, seperti Surat pernyataan penjamin (sesama anggota atau pihak ketiga) dan Dokumen jaminan fisik (jika koperasi mensyaratkan agunan).

Selain itu, dengan adanya dokumen hukum yang sesuai standar, transparansi dalam pengelolaan koperasi semakin meningkat. Anggota dapat lebih memahami prosedur yang berlaku, baik dalam hal penyetoran wajib, pengajuan pinjaman, maupun pembagian sisa hasil usaha. Akuntabilitas pengurus juga lebih terjamin karena setiap keputusan memiliki dasar hukum yang jelas dan terdokumentasi.

Penguatan pemahaman hukum ini merupakan “langkah strategis untuk meningkatkan keberlanjutan usaha dan perlindungan hukum koperasi” (Wahyudi & Listianti, 2025). Program ini juga diharapkan dapat “mendorong pengembangan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang lebih profesional dan akuntabel”. Laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel dapat digunakan sebagai alat untuk “memperbaiki pengelolaan keuangan dan meningkatkan kinerja keuangan kelompok Koperasi” (Supartini et al., 2024). Meningkatkan Kepercayaan Anggota dengan adanya legalitas yang jelas, anggota lebih percaya terhadap koperasi karena merasa hak-haknya dilindungi secara hukum. Legalitas badan usaha “meningkatkan kredibilitas koperasi di mata anggota, mitra bisnis, dan masyarakat luas”.



Gambar 1. Foto bersama pengurus Koperasi SMK PP  
Sumber: SMK PP 2025



Gambar 2. Edukasi tentang dokumen hukum  
Sumber: SMK PP 2025



Gambar 3. Kunjungan untuk observasi dokumen hukum  
Sumber: SMK PP Sembawa, 2025

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan partisipatif dapat memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola koperasi sekolah. Perbaikan dokumentasi dan penyusunan format pencatatan yang sederhana, namun terstruktur, menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan temuan (Pebriani et al., 2024) yang menyatakan bahwa pelatihan dan pendampingan koperasi terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Dengan demikian, meskipun pendampingan ini tidak melibatkan instrumen kuesioner, perubahan yang terjadi dapat diamati secara langsung melalui transformasi dokumen dan praktik kerja pengurus koperasi. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil memperkuat tata kelola koperasi di SMK PP Negeri Sembawa Mulia. Pendampingan ini juga memberikan pemahaman kepada pengurus koperasi mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang sesuai dengan PSAK, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kepercayaan anggota terhadap koperasi semakin meningkat, serta risiko konflik internal dapat ditekan.

## SIMPULAN

Kegiatan pendampingan penyusunan dokumen hukum koperasi di SMK PP Desa Persiapan Sembawa Mulia membawa dampak positif yang signifikan terhadap tata kelola organisasi. Dengan adanya dokumen hukum yang lengkap dan terstruktur, transparansi koperasi meningkat karena hak dan kewajiban anggota dapat diakses secara jelas, sementara alur administrasi simpan pinjam menjadi lebih terbuka. Selain itu, akuntabilitas pengurus juga semakin kuat, sebab dokumen hukum dan standar operasional prosedur yang disusun mempermudah proses pelaporan keuangan, audit internal, dan pertanggungjawaban dalam forum rapat anggota tahunan. Di sisi lain, mitigasi kredit macet lebih terkelola karena koperasi telah memiliki mekanisme penanganan kredit bermasalah yang bertahap dan terdokumentasi dengan baik. Secara keseluruhan, pendampingan ini tidak hanya memperbaiki aspek administratif, tetapi juga menumbuhkan budaya organisasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. R., Lazuarni, S., Putri, A. U., & Yeni, Y. (2022). Pelatihan Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Warung Sembako Desa Alai Selatan Kecamatan Lembak. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(3), 1328-1332.
- Anggraini, L. D., Wulandari, T., Purnamasari, E. D., & Faradillah, F. (2024). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Di Desa Lembak Kabupaten Muara Enim. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 111-118. <https://journal.dharmawangsa.ac.id/index.php/reswara/article/view/3700>
- Delzy Perkasa, R., Pratiwi, E., Husna, A., Putri, A., Islam, U., Sumatera, N., Medan, U., William, J., Ps, I. V, Estate, M., Percut, K., & Tuan, S. (2024). Analisis Permasalahan Kredit Macet Dalam Koperasi KSU Bona Mandiri Jaya. *Journal on Education*, 07(01), 930-941. <https://core.ac.uk/download/pdf/617760662.pdf>
- Lestari, P. A., Anggraini, L. D., Ratu, M. K., & Purnamasari, E. D. (2022). Pendampingan Pencatatan Akuntansi Sederhana Pada Umkm Kerupuk Dan Kemplang Di Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(3), 1380-1386.
- Marulitua Situmorang, D. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM. *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 5(Vol. 5 No. 2 (2023): Januari 2023), 1-12. <https://jan.jurnal.feb.untad.ac.id/index.php/jan/article/view/49>
- Mutiara, P., Marpaung, N. D., Tambunan, Y. K., Simangunsong, S., & Pangaribuan, M. E. (2024). Mengatur Keuangan Rumah Tangga yang Efektif di STM SEIA SEKATA. *Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 236-241. <https://doi.org/10.61253/abdicendekia.v3i2.247>
- Nasution, S., Hidayati, S., & Rahmadani Nasution, P. (2024). *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia*. 3(Vol 3 No 2 (2024): As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal), 1-9. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i2.160>
- Pebriani, R. A., Yustini, T., Sari, R., & Kholis, N. (2024). Pelatihan untuk Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Koperasi. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(4), 2991–3000. <https://doi.org/10.70609/icom.v4i4.5773>

- Safitri, S., Muhammad Sood, & Ahmad Zuhairi. (2024). kajian hukum terhadap perjanjian simpan pinjam pada koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Barat. *Commerce Law*, 4(2), 520–528. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5674>
- Supartini, S., Mranani, N. A., Muryani, E., & ... (2024). Peran Pendampingan Dalam Meningkatkan Kinerya Dan Manajemen Pengurus Koperasi Simpan Pinjamn Dan Pembiayaan Syariah. ... of Economy and ..., 02(01), 162–167. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN/article/view/228%0A>
- Wahyudi, & Listianti, Y. (2024). Penyuluhan Hukum Bagi Pengurus Koperasi Hikmah Berkah Silaturahim Tentang Pembentukan Badan Usaha. *Diseminasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.33830/disseminasiabdimas.v4i1.1957>
- Wahyudi, & Listianti, Y. (2025). Penyuluhan Hukum Bagi Pengurus Koperasi Hikmah Berkah Silaturahim Tentang Pembentukan Badan Usaha. *Padma*, 4(2), 661–672. <https://doi.org/10.56689/padma.v4i2.1592>.